

**ANALISIS PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nur Hidayanti<sup>1)</sup>, Fauzan<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>FEB/Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>1</sup>E-mail: [nurhidayanti161201@gmail.com](mailto:nurhidayanti161201@gmail.com)

<sup>2</sup>FEB/Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>E-mail: [fau136@ums.ac.id](mailto:fau136@ums.ac.id)

**Abstract**

*A regional device is established to carry out specific authorities, one of which is to increase local revenue. To achieve this goal, good budgeting is needed. The purpose of this study was to determine whether the role of the local revenue budget as a planning and cost control tool at the Sukoharjo Regency Housing and Settlement Area Office during the 2019-2022 fiscal year had played a good role. The method used in this research is descriptive qualitative method by collecting data through interviews, documentation, and literature, then analyzing the data through the calculation of effectiveness and variance, so that objective conclusions can be drawn on the problem. The results of the study for the analysis of the effectiveness ratio of local revenue are classified as very effective ability criteria because they always show results of more than 100%. And for the variance analysis of local revenue is also in the good category because it always shows a positive value or there is no budget period that experiences an unfavorable difference. So it can be concluded that the local revenue budget plays a good role as a planning and cost control tool at the Sukoharjo Regency Housing and Settlement Area Office.*

**Keywords :** Budget, Local Revenue, Planning, Cost Control

**1. PENDAHULUAN**

Mendirikan sebuah organisasi pasti didasarkan dengan adanya target atau tujuan yang ingin dicapai. Umumnya salah satu tujuan suatu perangkat daerah adalah mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah adalah alat untuk mengukur potensi kekayaan tertentu yang ada di suatu wilayah. Pendapatan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan daerah dan memperlancar proses pembangunan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah harus melibatkan penyusunan anggaran yang baik. Anggaran merupakan rencana keuangan yang penyusunannya secara teratur dan didasarkan pada program kerja yang telah disetujui sebelumnya. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu dana bergantung pada seberapa besar atau kecilnya

organisasi, yang berarti perencanaan sangat diperlukan (Hanum 2011). Dengan membandingkan anggaran dan hasil realisasi yang diperoleh akan didapatkan informasi apakah rencana kerja tersebut berhasil ataukah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses perumusan untuk menetapkan tujuan dimuka tentang berbagai keputusan yang akan diambil dikemudian hari guna mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian akan menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana tersebut. Pengendalian harus dilakukan dengan sangat teliti karena digunakan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang perlu untuk menghentikan berbagai penyimpangan yang ada. Dengan demikian, suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang melakukan perencanaan dan pengendalian biaya yang baik akan mudah mencapai target atau tujuannya dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian

dengan judul "Analisis Peranan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Sukoharjo sudah berperan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalahnya pada data yang digunakan, yaitu tahun anggaran 2019-2022.

### 1.1. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana strategis yang mencakup semua aktivitas kerja yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk periode waktu tertentu. Penganggaran merupakan sebuah metode dalam mempersiapkan suatu anggaran. proses penganggaran yang baik memerlukan adanya penaksiran atau ramalan. Tujuan menyusun ramalan tersebut adalah untuk mengukur atau menaksirkan kondisi bisnis di masa mendatang. Fungsi anggaran menurut (Mardiasmo 2009), dapat dibagi menjadi:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk menentukan aktivitas kerja yang akan dilakukan oleh sektor publik melalui belanja perusahaan tersebut.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk memberi rencana detail atas pengeluaran perusahaan agar dapat mengawasi pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas.
- c. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal pemerintah digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk bentuk kesepakatan legislatif dan komitmen eksekutif mengenai penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan dan sebagai alat komunikasi, yaitu anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh unit kerja untuk dilaksanakan.
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan terlaksananya efisiensi anggaran.
- g. Anggaran sebagai alat motivasi digunakan untuk memotivasi manajer dan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien.

- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik dengan arti harus melibatkan pihak masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam proses penganggaran publik.

### 1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah digunakan pemerintah daerah untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan daerahnya. Dengan itu, peran PAD sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Anggaran PAD adalah rencana atau target penerimaan pendapatan daerah yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam hal menilai potensi kekayaan tertentu di suatu wilayah. Menurut ketentuan Pasal 285 ayat (1) (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2014*), struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli daerah meliputi:
  - a) Pajak daerah;
  - b) Retribusi daerah;
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Pendapatan transfer; dan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### 1.3. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah yang diambil berdasarkan fakta dan taksiran untuk memaksimalkan efektivitas dalam memutuskan tindakan yang tepat di masa depan. Perencanaan dilakukan untuk memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membuat tujuan tersebut menjadi lebih terperinci. Dengan adanya anggaran, dapat menjadi alat yang mendukung penilaian efektivitas dalam perencanaan jangka pendek dan pengawasan perusahaan (Dewanti 2016). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan target atau tujuan yang ingin dicapai (Mahmudi 2016). Dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana. Sebab itu, efektif diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam hal perencanaan.

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan laporan realisasi dengan anggaran. Penerapan anggaran digunakan manajemen untuk melakukan penilaian apakah perusahaan telah bekerja secara efektif sesuai dengan rencana. Dalam penyusunan anggaran pendapatan asli daerah akan mengutamakan aspek penting, yaitu selalu

memperhatikan tahun anggaran sebelumnya sebagai pertimbangan dalam penyusunan anggaran selanjutnya. Oleh karena itu, anggaran memiliki peranan atau berfungsi sebagai alat perencanaan karena proses penganggaran dalam setiap periode akan selalu mempertimbangkan pengalaman sebelumnya, situasi saat ini dan peramalan di masa mendatang.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan penerimaan realisasinya dengan target yang dianggarkan. Menurut (Mahmudi 2016), nilai efektivitas pendapatan asli daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.

**Klasifikasi Kriteria Efektivitas PAD**

Kriteria Efektivitas	Presentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mahmudi (2016)

**1.4. Pengendalian Biaya**

Pengendalian biaya adalah proses pengawasan dari perusahaan dengan cara mengevaluasi perbedaan antara yang dianggarkan dengan realisasinya untuk menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan biaya. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan, anggaran juga berperan sebagai alat pengendalian biaya untuk melihat hasil pelaksanaan dari suatu rencana. Pengendalian berperan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyimpangan biaya antara yang telah dianggarkan dengan realisasinya, serta memberikan pertimbangan bagi perencanaan yang lebih baik di tahun berikutnya. Proses pengendalian biaya di suatu perusahaan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah direncanakan manajemen melalui pertimbangan pengalaman di masa lalu, kondisi saat ini, dan peramalan masa depan. Anggaran sebagai alat pengendalian dan pengawasan berarti mengevaluasi suatu pelaksanaan kerja, menurut (Tomu and Angreyani 2021) dapat dilakukan melalui empat cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan target yang dianggarkan (standar) dengan realisasinya.

- b. Menghitung selisih anggaran melalui analisis varians (*favourable dan unfavourable variance*).
- c. Mencari sebab-sebab penyimpangan yang dapat dikendalikan (*controllable*) maupun tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*).
- d. Merevisi standar biaya untuk periode berikutnya atau melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Sesuai dengan langkah-langkah di atas, maka analisis data yang digunakan adalah analisis varians pendapatan dengan kriteria penilaian kinerja PAD menurut (Mahmudi 2010) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

**Kriteria Penilaian Kinerja Varians PAD**

Kriteria	Ukuran
<b>Varians PAD</b>	
Baik	Realisasi PAD > Anggaran PAD
Kurang Baik	Realisasi PAD < Anggaran PAD

Sumber: Mahmudi (2010)

**2. METODE PENELITIAN**

**2.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif tentang analisis peran anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya. Penelitian deskriptif kualitatif difokuskan untuk pengumpulan data dan informasi, kemudian analisisnya bersifat kualitatif serta dijabarkan secara deskriptif.

**2.2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo. Sementara itu, objek penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2019-2022.

**2.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa data hasil wawancara dengan pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo. Sementara itu, data kuantitatif yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara yang dilakukan secara langsung ditempat penelitian dengan pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo. Dan data sekunder berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2019-2022. Sumber sekunder lainnya diperoleh melalui data keterangan, buku, dan jurnal untuk mendukung penelitian.

#### 2.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mengolah data yang terkumpul, sehingga dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- Melakukan pengumpulan data berupa anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah.
- Proses mengamati data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah.
- Melakukan wawancara ke DPKP Kabupaten Sukoharjo.
- Menganalisis peran anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya.
- Diambil hasil dari proses analisis data, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian.

Untuk menganalisis peran anggaran pendapatan asli daerah, dapat dihitung menggunakan instrumen analisis data sebagai berikut:

- Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
 
$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$
- Analisis Varians Pendapatan Asli Daerah
 
$$= \text{Realisasi PAD} - \text{Anggaran PAD}$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisis Peran Anggaran PAD Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat perencanaan diteliti dengan membandingkan

anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tersebut untuk menentukan tingkat efektivitasnya. Kemudian, dianalisis dengan melihat tabel klasifikasi kriteria efektivitas untuk mengetahui kategori tingkat persentase sesuai dengan hasil penelitian. Informasi tingkat efektivitas tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis peran anggaran dalam hal perencanaan. Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas PAD pada DPKP Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2019-2022 terangkum sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Analisis Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	135.500.000	207.490.000	153,13%	Sangat Efektif
2020	113.500.000	240.362.500	211,77%	Sangat Efektif
2021	125.500.000	207.892.500	165,65%	Sangat Efektif
2022	120.000.000	156.387.500	130,32%	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			165,22%	Sangat Efektif

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dari tahun anggaran 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 memiliki rasio efektivitas 153,13%, kemudian tahun 2020 meningkat sebesar 58,64% menjadi 211,77%. Namun, pada tahun 2021 menurun sebesar 46,12% menjadi 165,65% dan menurun kembali pada tahun 2022 sebesar 35,33% menjadi 130,32%. Hal ini, masih dapat dikatakan wajar karena tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan pada presentase efektivitas PAD di setiap tahunnya dan juga masih tetap tergolong dalam kriteria kemampuan yang sangat efektif dengan selalu menunjukkan hasil lebih dari 100%.

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi PAD dengan tergetnya untuk mengetahui tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah tersebut. Hasil dari perhitungan rasio telah dianalisis dan diukur sesuai klasifikasi kriteria efektivitas PAD. Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya (Mahmudi 2016). Kinerja keuangan pendapatan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila target yang telah dianggarkan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Penyusunan anggaran PAD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo bersama bidang perumahan khususnya bagian seksi rusun dan bersama bidang lainnya, yaitu bidang perencanaan dan keuangan. Peran anggaran tersebut sangat penting karena dengan adanya anggaran dapat dijadikan sebagai alat perencanaan atau petunjuk pengeluaran untuk periode yang akan datang. Anggaran PAD sebagai alat perencanaan digunakan untuk memperkirakan target yang ingin dicapai, sehingga dapat meminimalkan suatu beban perusahaan.

### 3.2. Analisis Peran Anggaran PAD Sebagai Alat Pengendalian Biaya

Anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian diteliti dengan mengukur perbedaan atau selisih antara target yang dianggarkan dengan realisasinya. Kemudian, dianalisis dengan melihat standar pengukuran kriteria analisis varians PAD untuk menentukan kategori kinerja keuangan pendapatan asli daerahnya termasuk baik atau kurang baik dilihat dari hasil penelitian. Jika terdapat selisih kurang dari target pendapatan yang dianggarkan, maka perlu mencari sebab-sebab adanya penyimpangan tersebut dan segera dilakukan perbaikan yang tepat. Adapun hasil perhitungan analisis varians PAD pada DPKP Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2019-2022 terangkum sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Analisis Varians PAD**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Analisis Varians	Kriteria
2019	135.500.000	207.490.000	71.990.000	Baik
2020	113.500.000	240.362.500	126.862.500	Baik
2021	125.500.000	207.892.500	82.392.500	Baik
2022	120.000.000	156.387.500	36.387.500	Baik
<b>Rata-rata</b>			79.408.125	Baik

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil perhitungan varians PAD dari tahun anggaran 2019-2022 memiliki kriteria kinerja keuangan yang baik karena selalu menunjukkan selisih lebih pendapatan. Selisih paling menguntungkan, yaitu terjadi pada tahun 2020 dengan nilai positif sebesar Rp126.862.500,00 dan pada tahun 2022 memiliki selisih dengan keuntungan paling rendah, yaitu bernilai positif Rp36.387.500,00.

Pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dikarenakan adanya dampak pandemi *covid-19* dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Perubahan tersebut menyebabkan salah satu sumber pendapatan asli daerah berupa retribusi pelayanan penguburan/pemakaman tidak lagi ditangani oleh DPKP Kabupaten Sukoharjo, melainkan mulai ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo. Walaupun demikian, selisih PAD tahun 2022 tetap menguntungkan meskipun merupakan selisih lebih terkecil daripada tahun-tahun sebelumnya yang telah dianalisis.

Analisis ini menggambarkan perbandingan antara realisasi PAD dengan tergetnya untuk mengukur perbedaan atau selisih diantaranya dan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan biaya. Hasil dari analisis varians telah diukur sesuai dengan standar pengukuran kriteria analisis varians PAD. Jika terjadi selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang ditargetkan) maka dikatakan mempunyai kinerja keuangan pendapatan yang baik, sedangkan jika terjadi selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang ditargetkan) maka kinerja keuangan pendapatan daerah dinilai kurang baik (Mahmudi 2010).

Kegiatan pengendalian biaya pada umumnya dipegang oleh bagian keuangan. Tetapi pimpinan beserta seluruh staf kantor DPKP Kabupaten Sukoharjo ikut berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi agar semuanya terpantau sesuai dengan yang dianggarkan. Anggaran PAD sebagai alat pengendalian biaya memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan menciptakan motivasi guna meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, penerapan pengendalian biaya yang baik dapat meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2019-2022 sudah berhasil mencapai lebih dari 100% yang artinya kinerja keuangan pendapatan asli daerahnya sangat efektif. Maka, dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat perencanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sudah berperan dengan optimal, sehingga realisasinya sangat efektif selama tahun anggaran 2019-2022. Sementara itu, berdasarkan hasil analisis varians PAD selama tahun anggaran 2019-2022 selalu mengalami keuntungan tetapi kurang menunjukkan kestabilan. Meskipun hasil analisis varians PAD mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap menunjukkan nilai yang positif. Hal ini, terbukti dengan tidak adanya tahun anggaran yang mengalami selisih kurang yang artinya kinerja keuangan pendapatan asli daerahnya berada pada kategori baik. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola dan mengendalikan pendapatan asli daerahnya. Maka, dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan asli daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sudah berperan dengan baik sebagai alat pengendalian biaya, karena dapat menunjukkan capaian realisasi yang terarah dan terkendali sesuai dengan target yang dianggarkan.

Hasil dari peran anggaran pendapatan asli daerah sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan asli daerah dan realisasinya agar mencapai kestabilan yang lebih baik di periode selanjutnya. Dalam penyusunan anggaran pendapatan asli daerah hendaklah pemerintah lebih memperhatikan berbagai aspek, agar target yang dianggarkan dapat terealisasi dengan maksimal.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih teliti dalam menganalisis suatu kinerja keuangan pemerintah khususnya dalam kinerja

anggaran pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak teknik analisa serta berbagai perhitungan dengan rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah. Dengan itu diharapkan dapat menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat, handal, dan lebih maksimal.

#### 5. REFERENSI

- Dewanti, Yopy Ratna. 2016. "Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Atas Sistem Anggaran Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)." *Jurnal Lentera Akuntansi* 2 (1): 86–101.
- Hanum, Zulia. 2011. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serang Bedagai." *Jurnal Ilmiah & Bisnis* 10 (2): 1–23.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga Group.
- . 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. 6th ed. Yogyakarta: Andi.
- Tomu, Ahmad, and Felisia Angreyani. 2021. "ANALISIS ANGGARAN KAS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA TOKO PHALENG COLLECTION & CUSTOM." *JURNAL ULET* 5 (1): 39–57.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.